
PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH SE-PROVINSI JAWA TENGAH BERKONSEP VALUE FOR MONEY SAAT COVID 19

Dewi Safitri¹, Djauhar Edi Purnomo², M. Fitrayudi T³

¹Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

^{2,3} Program D3 Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Korespondensi email: djauharedipurnomo@gmail.com

Diterima : Herna Rizaldi Tanggal 12 Juni 2024, Direvisi : Herna Rizaldi,
Tanggal 14 Juni 2024, Disetujui : Saebani Tanggal 20 Juni 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel Opini Audit dan variabel Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 35 sampel yang diperoleh dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder. Hasil dari analisa penelitian ini adalah 1) Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19, 2) Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19, 3) Opini Audit dan Temuan Audit BPK secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19.

Kata Kunci: *Audit Opinion, BPK Audit Findings, Local Government Performance*

THE INFLUENCE OF AUDIT OPINION AND AUDIT FINDINGS ON THE PERFORMANCE OF GOVERNMENTS IN THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA WITH THE CONCEPT OF VALUE FOR MONEY DURING COVID 19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel Opini Audit dan variabel Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 35 sampel yang diperoleh dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder. Hasil dari analisa penelitian ini adalah 1) Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19, 2) Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19, 3) Opini Audit dan Temuan Audit

BPK secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah se-Provinsi Jawa Tengah berkonsep Value for Money (Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) saat COVID 19.

Keywords: Audit Opinion, BPK Audit Findings, Local Government Performance

PENDAHULUAN

Hasil pemeriksaan BPK berupa opini audit, temuan audit, kesimpulan audit, maupun rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP BPK mengklasifikasikan opini menjadi beberapa jenis, opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Tengah dari 2012 – 2020 terus mengalami perbaikan yang signifikan (Ditasari & Sudrajat, 2020). Bahkan dalam waktu dua tahun ini berturut-turut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dengan jumlah 36 laporan keuangan daerah yang terdiri dari 29 Pemerintah Daerah Kabupaten, 6 Pemerintah Daerah Kota, dan 1 Pemerintah Daerah Provinsi.

Adanya pandemi COVID 19 menyebabkan adanya dinamika dalam kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) LKPD se-Provinsi Jawa Tengah ditemukan adanya permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas ketidaksesuaian penyajian akun terkait dengan Penanganan COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dalam LKPD Tahun 2020 seperti penatausahaan persediaan antara lain untuk penanganan COVID 19 belum didukung dengan pencatatan yang memadai (mutasi masuk keluar); Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai kondisi senyatanya (Elda et al., 2021).

Provinsi Jawa Tengah dengan lokasi yang strategis menjadi lokasi yang terdampak COVID 19. Dengan adanya pandemic dan perubahan kebijakan, kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah diperkirakan menurun (Mappiasse, 2018). Mengutip jatengdaily.com, pada Triwulan III-2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berkontraksi sebesar 5,32% atau minus 5,32% (*Year on Year/YoY*). Sebelumnya turun 5,94% (*YoY*) pada kuartal kedua 2020. Pertumbuhan ekonomi yang menurun atau *negative* di Jawa Tengah juga lebih dalam dari rata-rata nasional.

Bagi organisasi sektor publik, pengukuran kinerja keuangan sangat dibutuhkan untuk menilai apakah individu atau kelompok dalam organisasi telah menunjukkan pelayanan publik yang baik, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Aafiah Millenia, 2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerapan konsep *value for money* juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan Negara sehingga dapat meminimalisir kebocoran anggaran (Andani et al., 2019). Pasal 3 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menjelaskan bahwa penggunaan

keuangan Negara perlu dikelola dengan prinsip efektif dan efisien, untuk mengefektifkan penggunaan keuangan Negara menunjukkan bahwa setiap keuangan Negara yang dikeluarkan guna mencapai manfaat untuk masyarakat yang sebesar-besarnya (Aafiah Millenia, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data sekunder yang diperoleh dari pemerintah daerah di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Data yang dianalisis meliputi anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah, opini audit, serta neraca keuangan selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020, dengan fokus pada data keuangan dan audit dari pemerintah daerah di seluruh Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup 29 kabupaten dan 6 kota.

Target/Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah metode sensus atau sampling jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian.

Prosedur

Penelitian ini mengikuti prosedur berikut:

1. Pengumpulan data sekunder dari LHP LKPD tahun 2020.
2. Klasifikasi data berdasarkan kategori anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, opini audit, dan temuan audit.
3. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS untuk analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.
4. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2020
- Website resmi BPK (e-ppid.bpk.go.id) untuk data opini audit
- Checklist pengungkapan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teknik Analisis Data

Pertama, analisis statistik deskriptif dilakukan menggunakan program IBM SPSS 21 untuk menguraikan karakteristik dasar dari variabel yang diteliti.

Selanjutnya, uji asumsi klasik diterapkan untuk memastikan model regresi linier berganda memenuhi persyaratan yang diperlukan. Uji asumsi klasik ini meliputi tiga jenis uji: uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan apakah nilai residual dalam model berdistribusi normal. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. untuk semua variabel lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian, uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk semua variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, yang berarti tidak ada gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat scatterplot dari residual. Hasil scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di sekitar sumbu Y, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model, sehingga model regresi yang digunakan layak.

Analisis selanjutnya menggunakan regresi linier berganda untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen (Opini Audit dan Temuan Audit) terhadap kinerja pemerintah daerah, yang diukur dengan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dari output tabel regresi, diperoleh persamaan regresi untuk masing-masing rasio, menunjukkan bagaimana setiap variabel independen berkontribusi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Opini Audit dan Temuan Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah untuk semua rasio yang diuji. Selain itu, uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Terakhir, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Opini Audit dan Temuan Audit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan bantuan program IBM SPSS 21. Analisis ini mencakup pengumpulan data terkait opini audit, temuan audit, dan kinerja pemerintah daerah dari 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan meliputi realisasi pengeluaran, anggaran pengeluaran, realisasi pendapatan, dan anggaran pendapatan selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua data yang digunakan berdistribusi normal, tidak ada masalah multikolinieritas di antara variabel independen, dan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa opini audit secara signifikan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hipotesis 1a mengindikasikan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah dalam hal rasio ekonomi, dengan t hitung sebesar 2.942 dan signifikansi 0.006. Demikian pula, hipotesis 1b dan 1c menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap rasio efisiensi dan efektivitas, dengan nilai t hitung masing-masing sebesar 2.326 dan 2.390 serta signifikansi masing-masing sebesar 0.026 dan 0.023.

Temuan audit juga ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Uji hipotesis 2a menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap rasio ekonomi dengan t hitung 2.934 dan signifikansi 0.006. Untuk rasio efisiensi dan efektivitas, temuan audit juga berpengaruh signifikan, dengan nilai t hitung masing-masing sebesar 4.064 dan 7.131 serta signifikansi masing-masing sebesar 0.000. Semakin banyak temuan audit yang terungkap, semakin rendah tingkat kinerja ekonomi dan efisiensi pemerintah daerah, namun hal ini mendorong peningkatan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mengeksplorasi kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah selama pandemi COVID-19, analisis statistik deskriptif menjadi langkah pertama untuk memahami dinamika data yang terkumpul. Dengan menggunakan program IBM SPSS 21, kami mengumpulkan dan menganalisis data terkait opini audit, temuan audit, dan kinerja keuangan dari 35 Kabupaten dan Kota di wilayah tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa semua data memiliki distribusi normal, tanpa masalah multikolinieritas, dan sesuai dengan asumsi homoskedastisitas, memvalidasi pemilihan model regresi.

Melangkah lebih jauh, uji hipotesis mengungkapkan pengaruh signifikan opini audit terhadap kinerja pemerintah dalam tiga dimensi: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hipotesis 1a, 1b, dan 1c menegaskan bahwa opini audit secara positif mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Hasil yang konsisten menunjukkan bahwa opini audit yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif, terutama di masa krisis.

Namun, temuan audit juga memainkan peran penting dalam membentuk kinerja pemerintah daerah. Temuan audit yang tinggi mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja pemerintah. Hasil uji hipotesis 2a, 2b, dan 2c menunjukkan bahwa temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah dalam aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Semakin tinggi jumlah temuan audit, semakin rendah kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran secara tepat, efisien, dan efektif.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan bukti kuat bahwa baik opini audit maupun temuan audit secara bersama-sama mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Melalui uji F , kami mengonfirmasi bahwa kedua variabel independen ini berkontribusi signifikan terhadap rasio ekonomi, efisiensi, dan

efektivitas, menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini menyoroti kebutuhan akan praktik tata kelola yang baik dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19, untuk memastikan pemanfaatan anggaran yang optimal demi kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa opini audit dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah selama pandemi COVID-19. Opini audit yang baik meningkatkan kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di sisi lain, temuan audit yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dapat menghambat kinerja pemerintah dalam aspek keuangan tersebut. Melalui analisis statistik dan uji hipotesis, kami menyimpulkan bahwa baik opini audit maupun temuan audit memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Saran

Saran kami adalah guna untuk menjalankan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi lebih dalam hubungan antara opini audit, temuan audit, dan kinerja pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam perjalanan ini, penting untuk memperkuat metode penelitian serta memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat diandalkan. Selain itu, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pejabat pemerintah setempat akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga mendorong praktik tata kelola yang lebih baik di tingkat lokal.

REFERENSI

- Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786–803. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111–130. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 104. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7668>
- Elda, N., Sulistyono, & Dianawati, E. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Riset*

- Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1-8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5470>
- Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 51-55. <https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.86>
- B. Sore, Uddin. Sobirin. (2017). Kebijakan Publik. Makassar: CV Sah Media. E-book. Diambil dari books.google.co.id pada 30 November 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun 2020 se-Provinsi Jawa Tengah. Diambil dari e-ppid.bpk.go.id pada Desember 2021
- Bastian. (2001). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Audit 700. Diambil dari pasap.iapi.or.id pada 10 Januari 2022
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. (2021). Standar Audit 705. Diambil dari pasap.iapi.or.id pada 10 Januari 2022
- Jacobs, K. (1998). Value For Money Auditing In New Zealand: Competing For Control In The Public Sector. In *British Accounting Review* (Vol. 30).
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Riska Amalia Sari. (2021). Determinan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Ukuran Daerah, Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Widodo, Dr. Joko. (2021). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Media Nusa Creative. E-book. Diambil dari books.google.co.id pada 30 November 2021